

ABSTRACT

Ano Sumarno, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Djuanda University, 2020. Implementation of Policies for Street Vendors Arrangement by Satpol PP at Pesanggrahan Market, South Jakarta Administrative City. Advisor I, Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si. Second Advisor, Dra. Ginung Pratidina, M.Si.

This study aims to describe the arrangement of street vendors (PKL) in the Pesanggrahan market, South Jakarta Administrative City, then to find out the obstacles faced and the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in overcoming the constraints of PKL arrangement.

This research is a qualitative descriptive study. The research subjects were determined by the purposive method. Data were obtained by interview, documentation, and observation. The data analysis technique used the inductive technique. The theory of policy implementation used is the theory according to George C. Edward. There are four dimensions of policy implementation used in this study, namely communication, resources, executive attitudes, and bureaucratic structures.

The results of this study indicate that the implementation of the arrangement policies for street vendors at Pesanggrahan Market is good with an average value of 4.44 for officers and 3.59 for traders, and the analysis of these variables shows that the arrangement policies for street vendors at Pesanggrahan Market are part of the from the development policy of the City Administration of South Jakarta. The street vendor arrangement policy is carried out by the South Jakarta Administration City Government to create an orderly, clean, safe, and comfortable city by the Spatial Plan. In structuring the street vendors at the Pesanggrahan Market, through related agencies, they have made various efforts to control street vendors in the city of South Jakarta Administration.

Keywords: Policy Implementation, Arrangement, Street Vendors



ABSTRAK

Ano Sumarno, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, 2020. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP di Pasar Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pembimbing I, Drs. R. Akhmad Munjin, M.Si. Pembimbing II, Dra. Ginung Pratidina, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan pedagang kaki lima (PKL) di pasar Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, kemudian untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kendala-kendala penataan PKL.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan cara purposive. Data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Teknis analisis data digunakan teknik induktif. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori menurut George C. Edward ada empat dimensi implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap Pelaksana dan Struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Pesanggrahan adalah baik dengan rata-rata nilai 4,44 pada unsur petugas dan 3,59 pada unsur pedagang, Dan analisis dari variabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di lakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, aman dan nyaman sesuai dengan rencana Tata Ruang. Dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pesanggrahan melalui instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima di kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima